

Politik Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional

Oleh
Murti Ayu Hapsari¹ dan Aminoto²

ABSTRAK

Penelitian hukum ini dibuat untuk mengidentifikasi pengaturan perencanaan hukum yang diterapkan dalam perencanaan pembangunan nasional dalam kurun waktu setelah kemerdekaan hingga pasca amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan identifikasi pengaturan perencanaan pembangunan nasional tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang sekarang diterapkan. Berangkat dari permasalahan tersebut dirumuskan beberapa konsep untuk memberikan perbaikan dalam sistem pembangunan guna mencapai tujuan negara.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis ditarik kesimpulan. 1) Dinamika pengaturan perencanaan pembangunan nasional dari masa ke masa mengalami perubahan baik dari dasar hukum, aktor pembentuk, dan dokumen perencanaan hal tersebut dipengaruhi oleh baik sistem demokrasi maupun sistem pemerintahan yang kala itu diterapkan, 2) Berangkat dari permasalahan ketidaksinambungan, maka dapat ditambahkan pasal di konstitusi terkait perencanaan pembangunan nasional serta menetapkan RPJM Nasional dalam bentuk UU. Saran dari penulis adalah untuk mengikutsertakan DPD dalam pembahasan UU RPJP Nasional untuk menambah kontrol serta kualitasnya sehingga lebih berorientasi pada kepentingan nasional serta menambah derajat representasi rakyat dalam proses pembangunan

Kata Kunci : Politik hukum, perencanaan pembangunan nasional, konsep ideal.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Legal Politics of National Development Planning

by

Murti Ayu Hapsari³ and Aminoto⁴

Abstract

This legal research is dedicated to identify the regulations of national development planning that is implemented since independent day of Indonesia since the 4th constitution amendments. Based on that issue, there were some problems that can be found on current national development planning. built upon those problems, this research try to made some concept that can be implemented to improve the current national development planning system to be able to reach the ultimate goal of the nations (Tujuan Negara).

This research can be categorized as normative research. normative research is a research that focused on analyzing legal materials that is consist of secondary data. secondary data divided into three kinds of legal material: primary, secondary, dan tertiary legal materials. Data processed and analyzed using descriptive method.

Research result shows that: 1) implementation of national development regulations changes over times depends on some factors, that is its legal basis, actors, and planning documents that is effected by democratic system and government system implemented. 2) Problems on current Planning Development system can be fixed by adding an article on constitution that has more specific order about national development planning, and thus by changing RJPMN from Peraturan Presiden to Undang-Undang.

Keywords: legal politics, national development planning, ideal concepts.

³ Student Master of Law Science from Faculty of Law of Gadjah Mada University

⁴ Lecturer of the State Administration Department from of Faculty of Law of Gadjah Mada University